

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 4, Mei 2023, Halaman, 248-252
 e-ISSN: **2986-6340**
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7954042>

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Bidang Pendidikan

**Shella Assyifa¹, Nida Ageng Rahmawati², Ari Maulana³, Pramayuda Aprila⁴,
 M.Arifin Ilham⁵**

¹²³⁴⁵Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi
 E-mail: ¹*shellaassyifa804@gmail.com, ²223401102@student.unsil.ac.id, ³223401098@student.unsil.ac.id,
⁴223401100@student.unsil.ac.id, ⁵223401087@student.unsil.ac.id

Abstrak

Pendidikan adalah hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk memastikan terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh warga negara. Selain itu, warga negara juga memiliki kewajiban untuk mengikuti Pendidikan serta mematuhi peraturan dan tata tertib di lingkungan pendidikan. Pemenuhan hak dan kewajiban pendidikan warga negara Indonesia juga membutuhkan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam rangka memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban pendidikan warga negara Indonesia, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Dukungan dari berbagai pihak akan memperkuat sistem pendidikan nasional, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di global.

Kata kunci: *Hak dan kewajiban warga negara, Pendidikan*

Abstract

Education is the right and obligation of every Indonesian citizen. The fulfillment of these rights and obligations is very important to achieve national development goals. In the field of education, the Indonesian government has issued various policies and programs to ensure the fulfillment of the right to education for all citizens. In addition, citizens also have an obligation to participate in education and comply with rules and regulations in the educational environment. Fulfillment of Indonesian citizens' rights and obligations to education also requires support and participation from various parties, including families, communities, and educational institutions. In addition, there is a need to improve the quality of education and human resource development. In order to ensure the fulfillment of the educational rights and obligations of Indonesian citizens, there is a need for synergy between the government, society and educational institutions. Support from various parties will strengthen the national education system, so that it is able to produce quality human resources and be able to compete globally.

Keywords: *rights and obligations of citizens, Education*

PENDAHULUAN

Dalam sejarah, Indonesia telah tercatat mengenai kewajiban yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sejak jaman penjajahan sampai jaman kerajaan. Dilihat ketika saat penjajahan oleh bangsa Belanda dan Jepang warga negara Indonesia selalu memenuhi kewajiban yang diperintahkan pihak kolonial baik dalam segi bagi hasil oleh para petani atau kepada masyarakat biasa yang wajib melakukan pekerjaan tanpa upah. Kewajiban yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang dilaksanakan dengan patuh sesuai peraturan yang diberikan oleh pihak tertinggi dengan ketentuan dan hukuman yang tertera ketika salah satu warga negara Indonesia tidak memenuhinya dapat dihakimi. Ketaatan dalam

pemenuhan kewajiban tidak diimbangi dengan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia baik kehidupan dan kesejahteraan terlihat bagaimana kondisi hak ditiadakan dari segi ekonomi, politik, pendidikan dan budaya. Ketidakseimbangan ini memunculkan pemberontakan dalam diri warga negara Indonesia.

Pemenuhan kewajiban tetapi menyepelekan hak menimbulkan percikan atas hak yang harus dilakukan oleh pihak tertentu untuk diberikan kepada setiap warga negara Indonesia. Pemberontakan diawali pada setiap daerah hingga terbentuk organisasi yang menjadi wadah perkumpulan warga negara Indonesia untuk mendapatkan haknya sampai kepada peristiwa-peristiwa yang menggugurkan para pejuang Indonesia dalam menggapai hak warga negara Indonesia dan berujung kepada perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia pada 17 agustus 1945, dalam kutipan buku Max Havelaar menurut multatuli yang jelas lahir dari tuntutan hak-hak mereka.

Pemunculan adanya hak menimbulkan berbagai masalah yang salah diartikan penggunaan yang mengacu kepada sifat kepentingan individu, dikuatkan dalam pasal-pasal UUD 1945 mengarahkan kepribadian warga negara menjunjung hak nya agar didapatkan tetapi melalaikan kewajibannya, dalam sosiologi konsep ini dikenal dengan istilah “strong sense of entitlement”. Hal ini memungkinkan akan terjadinya sifat individualisme dan hilangnya sosial masyarakat dalam kehidupan karena setiap orang akan terlalu berfikir untuk mengacu kepada haknya masing-masing tanpa memikirkan orang lain. Hanya didalam masyarakatlah manusia dapat menumbuhkan inovasinya dan menjadi manusia yang sesungguhnya. Peran pemerintah sebagai kuasa tertinggi seperti kepada kekaisaran di jepang dimana negara memiliki kuasa absolut kepada rakyatnya, dengan demikian pengakuan hak-hak manusia tidak akan sampai kepada individualisme.

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk menyediakan akses yang sama dan memadai untuk semua warga negara Indonesia tanpa diskriminasi. Selain itu, setiap warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan kesempatan pendidikan yang tersedia dan berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan. Namun, terdapat beberapa permasalahan terkait pemenuhan hak dan kewajiban warga negara Indonesia di bidang pendidikan. Salah satu permasalahan utama adalah kekeliruan dalam hal pemahaman dan perbuatan terkait pendidikan. Kekeliruan ini dapat terjadi karena kurangnya informasi atau pemahaman yang kurang tepat tentang hak dan kewajiban pendidikan, serta kurangnya kesadaran dan komitmen dari masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut.

Selain itu, permasalahan lain yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban pendidikan adalah kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Hal ini dapat memicu ketimpangan dalam hal kesempatan pendidikan dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pendidikan, serta memperkuat akses dan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan dan sosialisasi yang tepat sasaran, serta dukungan dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua warga negara Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode studi literatur dengan membaca dari beberapa buku untuk dijadikan referensi dan dijadikan data dalam penyusunan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam upaya itu penelitian ini menggunakan tahap analisis data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hak dan kewajiban pada dasarnya tidak dapat di pisahkan keduanya saling berhubungan antara lain jika ada hak maka akan terdapat kewajiban.

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia juga terdapat dalam bidang pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk menyediakan akses yang sama dan memadai untuk semua warga negara Indonesia tanpa diskriminasi. Selain itu, setiap warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan kesempatan pendidikan yang tersedia dan berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan.

Terdapat beberapa pasal di dalam Undang-undang Dasar 1945 yang mencantumkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, diantaranya:

1. Berhak mengembangkan diri dan mendapatkan pendidikan, tercantum di dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”
2. Berhak memilih pendidikan dan pengajaran sesuai yang diinginkannya, tercantum di dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”
3. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sebagaimana di Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."
4. Mendapatkan pendidikan dasar yang dibiayai pemerintah, tercantum di dalam Pasal 31 ayat (2).
5. 3. Pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tertera dala Pasal 31 ayat (3).Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang."

6. Pemerintah wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat, terkandung di dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945.

Namun, terdapat beberapa permasalahan terkait pemenuhan hak dan kewajiban warga negara Indonesia di bidang pendidikan. Salah satu permasalahan utama adalah kekeliruan dalam hal pemahaman dan perbuatan terkait pendidikan. Kekeliruan ini dapat terjadi karena kurangnya informasi atau pemahaman yang kurang tepat tentang hak dan kewajiban pendidikan, serta kurangnya kesadaran dan komitmen dari masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut.

Selain itu, permasalahan lain yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban pendidikan adalah kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Hal ini dapat memicu ketimpangan dalam hal kesempatan pendidikan dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua warga negara Indonesia.

Dilakukannya upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pendidikan, serta memperkuat akses dan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan dan sosialisasi yang tepat sasaran, serta dukungan dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua warga negara Indonesia.

Jika dalam sudut hak pemerintah berupaya dalam memenuhi hak pada setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dengan layak dan sesuai dengan pasal hukum yang berlaku, ketimpangan dalam kewajiban yang tidak disadari oleh warga negara dalam pemenuhan kewajiban menjadi kendala dalam proses pemenuhan hak. Tanpa disadari warga negara berupaya untuk bisa mendapatkan hak tetapi mundur dalam kewajiban. Kewajiban salah satunya membayar pajak. Pajak negara dapat meningkatkan kas negara yang dimiliki untuk proses pembangunan nasional baik dalam bidang kontruksi atau dalam bidang pendidikan.

Pendidikan yang bagus untuk diperoleh warga negara Indonesia harus memiliki kas negara yang besar dan yang diketahui negara Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lingkungan jenis yang berbeda baik dalam segi akses atau lainnya. Maka pemenuhan hak yang dilakukan oleh pemerintah juga harus didukung dengan pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, agar saat hak di jalankan tidak terpendok di tengah jalan. Sebaliknya pemerintah juga harus berupaya maksimal dalam pemenuhan hak agar tidak adanya kesenjangan antara pihak sebab kewajiban yang telah dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pemenuhan hak dan kewajiban warga negara Indonesia di bidang pendidikan sangat penting untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan membangun masyarakat yang cerdas dan terdidik. Namun, terdapat kekeliruan dalam hal pemahaman dan perbuatan yang menghambat pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan

kesadaran warga negara Indonesia tentang pentingnya pendidikan serta kewajiban mereka dalam mendukung pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi, pelatihan, dan kegiatan yang mempromosikan pentingnya pendidikan dan kewajiban warga negara Indonesia dalam memajukan pendidikan. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu berperan aktif dalam memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia dan memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas

Referensi

- Affandi, Hernadi dan Affandi, Nursanti Kusumaastuti. (2013). Penelitian Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Kalangan Masyarakat Miskin di Kota Bandung. *Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran*.
- Hasanah, Imma Rahmani. (2022). Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Pal Rev |Journal Of L Aw*, 77-84. Diambil 10 Mei 2023 from <https://media.neliti.com/media/publications/557463-pelaksanaan-hak-dan-kewajiban-warga-negara-4ccbc25f.pdf>.
- Saksono, Gatut. (2008). Pendidikan Yang Memerdekakan Siswa. *Rumah Belajar Yabinkas*.